

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH

DWI AYU FEBIOLA

NIM : 2017210047

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa. Dampak yang terjadi yaitu penurunan perekonomian masyarakat, untuk itu pemerintah membuat kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada penanggulangan covid-19 yang diatur pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 terkait BST dalam upaya penanganan Covid-19. Kegiatan implementasi kebijakan program BST sangat membantu perekonomian masyarakat. Namun dalam implementasi penyalurannya sering terlambat, hal ini telah terjadi di Kota Batu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel sumber data menggunakan *purposive sampling*. Fokus masalah dari penelitian ini terkait implementasi kebijakan program BST dengan model implementasi yang digunakan adalah model Edward III. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi program BST oleh Dinas sosial kota batu telah dilaksanakan dan sudah tersalurkan meskipun terlambat kepada semua KPM berdasarkan DTKS dari pemerintah pusat dan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait bantuan-bantuan di masa pandemic Covid-19. Faktor penghambat dalam implementasi program BST di Kota Batu yaitu kurangnya pemahaman terkait program BST, waktu penyaluran terbelat mendadak dan kurang patuhi protokol kesehatan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, BST, Pandemi Covid-19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pada umumnya untuk memecahkan atau menjawab masalah yang sedang terjadi dan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Menurut Friedrich dan Anderson dalam (Langkai, 2020:31) kebijakan publik adalah keseluruhan proses aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meraih satu tujuan yang telah diinginkan sejak awal serta dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Dengan adanya kebijakan maka diharapkan dapat menjawab semua masalah yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat.

Implementasi dalam kebijakan publik dinilai sangat penting karena, dengan implementasi maka kebijakan dapat berjalan di lapangan dan berhasil dalam memberikan *output* dan *outcomes* pada masyarakat dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Penentuan *output* dan *outcomes* dapat ditentukan dari apakah kebijakan tersebut dalam implementasinya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan publik atau tidak sama sekali. Suatu kebijakan hanya akan menjadi wacana jika tidak diimplementasikan dengan baik (Sasmito dan Nawangsari, 2019).

Tahun 2020 terjadi merebaknya virus yang menular, virus ini pertama kali menyerang di Wuhan China selanjutnya disebut sebagai virus corona atau dalam ilmu kedokteran dinamakan *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19). Virus ini tersebar begitu cepat dan sudah menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia.

Jumlah orang yang divonis positif Covid-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan.

Dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya seperti ditetapkannya wabah virus *corona disease* sebagai halnya bencana nasional. Selain itu pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang sudah dinyatakan zona merah yang telah ditetapkan sesuai peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 terkait instruktur PSBB. Dengan harapan terputusnya rantai penyebaran Covid-19. Dengan berlakunya peraturan ini menghimbau masyarakat agar tidak berkerumunan dengan orang banyak artinya mereka harus saling menjaga jarak, mengurangi seluruh kegiatan yang berada di luar rumah sekalipun dalam hal mencukupi kebutuhan. (Rahmansyah,dkk: 2020).

Dengan demikian PSBB justru membawa dampak bagi masyarakat indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah penurunan perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya pertokoan dipaksa untuk tutup, tempat-tempat wisata pun dipaksa untuk tutup sementara waktu. Bukan hanya itu saja, pemutusan hubungan kerja juga terjadi di berbagai daerah, hasil pemasukan di pasar menurun. Jika kondisi seperti ini tidak diantisipasi dengan baik maka kemungkinan besar yang terjadi adalah ketidakstabilan perekonomian di Indonesia yang cenderung menurunnya kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan akibat Covid-19 pemerintah menggelontorkan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak Covid-19 (Mufida. 2020).

Bantuan sosial ini bersumber dari program pada masing-masing kementerian yang berimbang dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Banyak jenis macam bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu: BLT-DD, Bantuan Sosial Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Dari sekian banyak jenis bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah tidak semua masyarakat mendapat bantuan tersebut, hal ini dikarenakan sudah ada kriteria masing-masing yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Namun dalam penanganan dampak Covid-19 bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan sama sekali akan di data kembali dan akan menerima bantuan (Rahmansyah, 2020).

Salah satu bantuan yang berasal dari kementerian Sosial adalah BST (Kemensos) yang diambilkan dari APBN. Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 maka akan menjadi dasar dalam implementasi penyaluran BST kepada penduduk yang terkena dampak Covid-19. Bantuan sosial tunai diberika kepada masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Berdasarkan hasil keputusan Ketiga dan Kelima terkait petunjuk teknis dan penanggung jawab pelaksanaan BST dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya teknis pelaksanaan BST diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/HK.02.02/4/2020 terkait petunjuk teknis penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai), dengan tujuan menjadi bahan acuan yang memberikan satu informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan dan diberi solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi. Salah satu syarat KPM (Keluarga

Penerima Manfaat) BST yaitu keluarga tersebut tercantum dalam DTKS yang belum menerima bantuan sama sekali yaitu belum menerima PKH, bantuan sembako, BLT-DD dan lain sebagainya. Untuk pelaksana penyaluran BST dilakukan oleh Kantor Pos Indonesia yang sudah berbadan usaha milik negara.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang penduduknya menerima BST yang berasal dari Kementerian Sosial. Jumlah KPM di Jawa Timur cukup banyak. Dengan tersalurkannya Bantuan Sosial Tunai ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang menurun akibat Covid-19. Program bantuan ini sudah tersalurkan di berbagai kota di Jawa Timur.

Kota Batu merupakan kota dengan penghasilan daerah tertinggi dengan adanya wisata yang berkembang pesat di Kota Batu dan juga lahan pertanian yang luas dengan hasil pertanian yang bagus. Akan tetapi di tahun 2020 masyarakat Kota Batu mengalami penurunan ekonomi akibat wabah Covid-19. Sehingga masyarakat mendapat BST selama tiga bulan sejak bulan April-Juni 2020, pada penyaluran bantuan ini ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dengan nominal Rp.600.000. Namun bantuan ini diperpanjang sampai bulan Desember dengan nominal setengah dari jumlah bantuan awal yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Tidak sampai pada akhir tahun 2020 tetapi bantuan ini diberikan lagi kepada masyarakat di tahun 2021. Dasar penyaluran BST di Kota Batu mengacu pada surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin No 1379/6/BS./02/04/2020.

Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai berdasarkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dari pemerintah pusat. Salah satu desa yang masyarakatnya terdampak Covid-19 dan mendapat Bantuan Sosial Tunai

Kemensos yaitu Desa Pesanggrahan. Dalam realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada seluruh desa di Kota Batu dinilai lamban serta dianggap bahwa pemerintah dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah desa masih lemah (harian bhirawa, 2020). Sehingga pelaksanaan program BST harus memperhatikan empat aspek pokok yaitu komunikasi yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi terhadap pihak terkait, sumber daya pelaksana yang harus mumpuni untuk terlaksananya program BST di Kota Batu, sikap pelaksanaan dan juga struktur birokrasi lah yang menjadi acuan sangat penting dalam pelaksanaan BST. Sesuai penjelasan diatas, Maka penulis terdorong melaksanakan penelitian Tentang **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Batu bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat program Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Batu masyarakat yang terdampak Covid-19 ?

1.3 Tujuan penelitian

Sebuah penelitian memiliki tujuan-tujuan yang diinginkan, salah satu tujuan tersebut adalah :

1. Mengetahui implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Batu bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Batu masyarakat yang terdampak Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberi informasi bagi pembaca terkait teori yang ada di penulisan ini, khususnya teori-teori kebijakan publik yang nantinya dapat dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan berpolitik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kepada pembaca berupa wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan program BST bagi masyarakat di Kota Batu, khususnya bagi Program Studi Administrasi Publik.

3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai evaluasi untuk Dinas Sosial dan Pemerintah Desa dalam implementasi penyaluran bantuan sosial tunai.
- b. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang berwenang dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: Seribu Bintang.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Edisi 5*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelgensia Media.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. .
- Uddin B. Sore dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 18/6/SK/HK/02/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 22/6/SK/HK/02.20/4/2020 Perihal Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 18/6/SK/HK/02.20/4/2020 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Tahun 2021
- Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 1/6/SH/HK.02.02/1/2021 Tentang Perihal Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19) Tahun 2021.
- Perturan Walikota Batu nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kota Batu

Internet :

- Puspensos. 2020. *Solusi Hadapi Permasalahan Sosial Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai)*. <https://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>. (Diakses pada 1 November 2020 pukul 20.00 WIB)
- Richa, Irsya. 2020. *Bantuan Kemensos Dibagikan, Ada 10.673 KK Kota Batu yang Menerima*. <https://jatimtimes.com/baca/214779/20200514/174200/bantuan-kemensos-dibagikan-ada-10-673-kk-kota-batu-yang-menerima>. (Diakses pada 1 November 2020 pukul 20.00 WIB)
- Supriyatno, Helmi. 2020. *Dikeluhkan Lamban, Akhirnya BLT kemensos Cair di Kota Batu*. . <https://www.harianbhirawa.co.id/dikeluhkan-lamban-akhirnya-blt-kemensos-cair-di-kota-batu/>. (Diakses pada 1 November 2020 pukul 20.00 WIB)

Jurnal:

- Iping, Baso. 2020. *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol 1. Issue 2. E-ISSN:2716-375X.
- Mufida, Anisa. 2020. *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di tengah Pandemic Covid-19*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Vol 4. No 1. ISSN:23384638.
- Rahmansyah, Wildan, dkk. 2020. *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol II. No 1.
- Ridhuan Syamsu, dan Kaharuddin Syah. 2020. *Monitoring Pendistribusian Bantuan Sosial Warga Terdampak Covid-19 Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Jurnal Abdimas. Volume 6. Nomor 3.
- Sasmito. Cahyo dan Ertien Rining Nawangsari. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*. Journal Of Publik Sektpr Innovation. Vol 3. No 2. P-ISSN:2541-4291